

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai implementasi kebijakan pencegahan stunting di Kota Bengkulu, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Standar dan Sasaran Kebijakan

Pemerintah Kota Bengkulu telah menetapkan kebijakan penurunan stunting sebagai prioritas daerah, sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2021–2026 dan diperkuat oleh RKPD tahunan. Sasaran kebijakan sudah sesuai dengan standar nasional, yaitu ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan keluarga berisiko. Namun, pada tataran implementasi, pemahaman terhadap isi dan tujuan kebijakan belum merata di kalangan pelaksana, khususnya kader di tingkat Posyandu.

2. Komunikasi Antarorganisasi

Koordinasi lintas OPD telah difasilitasi melalui Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS). Namun, pelaksanaannya belum berjalan efektif. Beberapa instansi tidak aktif dalam pertemuan dan pelaporan. Mekanisme komunikasi vertikal dari pemerintah kota ke Puskesmas dan Posyandu masih belum seragam, yang menyebabkan perbedaan pelaksanaan program antarwilayah.

3. Sumber Daya

Implementasi kebijakan masih dihadapkan pada keterbatasan sumber daya, baik dari aspek jumlah dan kompetensi SDM maupun sarana pendukung. Banyak Posyandu mengalami kekurangan kader aktif, minim pelatihan, serta keterbatasan alat ukur standar dan logistik PMT. Meskipun anggaran telah dialokasikan melalui DAK dan Dana Desa, distribusinya belum merata dan sering mengalami keterlambatan.

4. Karakteristik Organisasi Pelaksana

Struktur pelaksana telah tersedia di tingkat dinas dan Puskesmas, namun belum seluruh wilayah memiliki struktur kelembagaan dan SOP pelaksanaan program yang seragam. Beberapa Posyandu masih bergantung pada inisiatif pribadi kader tanpa adanya pendampingan yang terarah dari organisasi induk.

5. Disposisi Pelaksana

Para pelaksana, khususnya kader dan petugas Puskesmas, menunjukkan sikap positif terhadap program penurunan stunting. Namun, keterbatasan informasi, pelatihan teknis, serta kurangnya keterlibatan dalam proses penyusunan kebijakan menyebabkan pelaksana belum sepenuhnya memahami substansi kebijakan yang harus diimplementasikan.

6. Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik

Dukungan sosial dari kelompok masyarakat seperti PKK, Dasa Wisma, dan Kader KB cukup aktif, namun belum merata di semua kelurahan. Secara politik, kebijakan telah memperoleh dukungan melalui Perda dan alokasi APBD, namun pengawasan dan evaluasi lintas sektor belum optimal. Dalam aspek ekonomi, alokasi anggaran sekitar Rp 3,7 miliar pada tahun 2023 sudah tersedia, tetapi efektivitas pemanfaatannya belum maksimal karena fokus lebih pada pengadaan daripada penguatan SDM dan operasional.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan beberapa saran Implementasi kebijakan penurunan stunting di Kota Bengkulu perlu diperkuat melalui penguatan kapasitas pelaksana dan sosialisasi kebijakan yang lebih komprehensif. Masih banyak kader dan pelaksana teknis yang belum memahami substansi kebijakan secara utuh, termasuk indikator capaian dan mekanisme pelaksanaannya. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Bengkulu melalui Dinas Kesehatan dan Puskesmas perlu secara aktif menyelenggarakan pelatihan teknis yang menyeluruh dan berkelanjutan. Selain itu, sosialisasi isi kebijakan tidak hanya dilakukan dalam bentuk formalitas rapat atau surat edaran, tetapi disampaikan dengan pendekatan edukatif dan berbasis kebutuhan lokal, agar kebijakan benar-benar dimengerti dan dijalankan sesuai dengan semangat peraturan yang berlaku.

Koordinasi lintas organisasi juga perlu diperkuat, terutama melalui optimalisasi peran Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS). Setiap

perangkat daerah yang terlibat harus menjalankan fungsinya secara aktif dan konsisten, serta dilibatkan dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program. Komunikasi antarinstansi harus didukung oleh sistem pelaporan yang terpadu dan alur informasi yang jelas, agar kebijakan tidak hanya tersampaikan secara administratif, tetapi benar-benar dipahami hingga tingkat pelaksana. Selain itu, kebutuhan sumber daya, baik SDM maupun non-SDM, harus dipetakan ulang secara objektif dan proporsional, untuk memastikan distribusi kader, alat ukur, PMT, serta logistik pendukung lainnya dapat menjangkau seluruh wilayah sasaran secara adil dan efektif.

Dukungan lingkungan sosial dan politik juga harus terus ditingkatkan agar kebijakan tidak hanya berjalan secara struktural, tetapi juga mendapatkan legitimasi sosial. Pelibatan aktif kelompok masyarakat seperti PKK, Dasa Wisma, dan kader KB dalam program stunting perlu difasilitasi dan diperluas jangkauannya. Pemerintah daerah dapat mengintegrasikan peran komunitas dalam perencanaan dan pelaksanaan program, agar tercipta sinergi antara pelaksana teknis dan masyarakat. Di sisi lain, DPRD dan lembaga pengawas perlu memperkuat fungsi kontrolnya terhadap pelaksanaan kebijakan melalui pengawasan anggaran, evaluasi program, dan dukungan politik yang berkelanjutan. Pengelolaan anggaran harus diarahkan tidak hanya untuk pemenuhan sarana, tetapi juga untuk mendukung pelatihan kader, insentif pelaksana, dan program pembinaan jangka panjang, agar kebijakan penurunan stunting dapat berjalan optimal, tepat sasaran, dan berkelanjutan.